

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten sebagai wilayah Daerah Otonomi dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

Sementara itu untuk menyesuaikan perkembangan keadaan dalam bidang pemerintahan, maka Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 diganti dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, dimana jabatan Kepala Daerah dipangku oleh Fungsionalis, sehingga Bupati tidak lagi merangkap sebagai Kepala Daerah. Kemudian dalam pelaksanaannya diterbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Desember 1957 Nomor : Pem.10/2/18, yang membentuk jabatan baru di lingkungan pamong praja, yaitu Pejabat Bupati atau disingkat Pd. Bupati yang dipangku oleh Patih setempat. Patih inilah sebagai Kepala Corps Pamong Praja yang sehari-harinya disertai tugas-tugas Pemerintahan Pusat, sedangkan Bupati diberikan kedudukan sebagai Bupati dp (diperbantukan) Residen (Surakarta) yang bertempat tinggal di Daerah Swatantra Tingkat II (Kabupaten) Klaten, sejak tanggal 1 Agustus 1958. Disamping itu juga masih ada pejabat yang disebut Kepala Daerah, yang dalam prakteknya bertindak atas nama Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah Swatantra yang bersangkutan yang menjalankan tugas-tugas otonomi dan medebewind, sehingga ada dualisme jabatan.

Pada Tahun 1959 terbitlah Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959, yang menetapkan bahwa Kepala Daerah diangkat oleh Menteri Dalam Negeri, dan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dibantu oleh sebuah badan yang bernama Badan Pemerintahan Harian. Disamping itu, Penetapan Presiden ini juga memuat tentang penyerahan tugas-tugas Pemerintahan Umum kepada Pemerintahan Daerah. Namun demikian peraturan tersebut baru direalisasikan pada Tahun 1963 dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1963 jo. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 1963. Sehingga dengan diterbitkannya peraturan tersebut berdampak dihapusnya dualisme dalam Pemerintahan Daerah, dimana telah disatukan kembali Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan bekas Pamong Praja ke dalam corps Pemerintahan Daerah. Bersamaan dengan itu, maka hapuslah pula Pemerintahan Kawedanan dengan Wedananya dan beralih sebagai fungsionaris pembantu/penghubung Bupati Kepala Daerah. Dengan demikian, maka Kantor Pemerintah Daerah dan Kantor Pamong Praja juga disatukan lagi pada satu tempat. Kemudian untuk menyempurnakan struktur Pemerintahan Daerah, maka pada tahun 1965 diterbitkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965.

Melihat sejarah-sejarah yang terjadi di Kabupaten Klaten seperti di atas, maka tim penggali Hari Jadi Kabupaten Klaten memilih tanggal pendirian benteng Klaten sebagai hari dan tanggal kelahiran Kabupaten Klaten. Hal ini didasarkan pada peristiwa awal munculnya nama Klaten dalam sumber sejarah (dasar nomenklatur) dan asas kontinuitas peristiwa-peristiwa sejarah yang ada di Klaten. Di samping itu dukungan sumber sejarah tertulis tentang pendirian Benteng Klaten juga menjadi dasar dipilihnya tanggal 28 Juli 1804 sebagai hari lahirnya Kabupaten Klaten dan telah ditetapkan dengan Perda Nomor 12 tahun 2007, tanggal 18 Juni 2007 tentang Hari Jadi Kabupaten Klaten.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2016 - 2021 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 sebagai Arahana Rencana Pembangunan Tahun 2016 - 2021 yang diimplementasikan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) disetiap tahunnya. Rencana Kerja pada Tahun 2017 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran merupakan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat; pada pasal 17 ayat (1) dijelaskan lebih lanjut bahwa LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran pada dasarnya merupakan *progress report* atas kinerja pembangunan selama satu tahun dan menjadi kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kegagalan dan keberhasilan pencapaian indikator kinerja akan dijadikan sebagai acuan tindakan perbaikan

dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Klaten di tahun mendatang dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan. Sedangkan mengenai muatan LKPJ dijelaskan pada pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 bahwa sekurang-kurangnya menjelaskan: a) Arah kebijakan umum pemerintahan daerah; b) Pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah; c) Penyelenggaraan urusan desentralisasi; d) Penyelenggaraan tugas pembantuan; dan e) Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

#### **A. Dasar Hukum Penyusunan LKPJ Tahun Anggaran 2017**

Dasar Hukum yang melandasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klaten Tahun Anggaran 2017 adalah :

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031;

- l. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2017;
- n. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
- o. Peraturan Bupati Klaten Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2017;
- p. Peraturan Bupati Klaten Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017

## **B. Gambaran Umum Kabupaten Klaten**

### **1. Kondisi Geografis Daerah**

#### **a. Letak Wilayah**

Kabupaten Klaten terletak antara 7°32'19" Lintang Selatan sampai 7°48'33" Lintang Selatan dan antara 110°26'14" Bujur Timur sampai 110°47'51" Bujur Timur. Dengan batas-batas administrasi wilayah Kabupaten Klaten sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali,
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo,
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul (DIY), dan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman (DIY)

#### **b. Luas Wilayah**

Secara administratif Kabupaten Klaten dibagi menjadi 26 kecamatan, 391 desa dan 10 kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan seluas 65.556 ha (655,56 km<sup>2</sup>) atau seluas 2,014% dari luas Provinsi Jawa Tengah, yang luasnya seluas 3.254.412 ha. Secara rinci luas wilayah Kabupaten Klaten per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel: 1.1**  
**Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan, dan Pedukuhan, Per-Kecamatan**  
**Di Kabupaten Klaten Tahun 2017**

NO	KECAMATAN	DESA	KELURAHAN	DUKUH	LUAS WILAYAH ( KM <sup>2</sup> )
1	Prambanan	16	-	183	24,43
2	Gantiwarno	16	-	149	25,64
3	Wedi	19	-	178	24,38
4	Bayat	18	-	228	39,43
5	Cawas	20	-	238	34,47
6	Trucuk	18	-	171	33,81
7	Kalikotes	7	-	99	12,98
8	Kebonarum	7	-	65	9,67
9	Jogonalan	18	-	202	26,70
10	Manisrenggo	16	-	252	26,96
11	Karangnongko	14	-	35	26,74
12	Ngawen	13	-	124	16,97
13	Ceper	18	-	42	24,45
14	Pedan	14	-	151	19,17
15	Karangdowo	19	-	161	29,23
16	Juwiring	19	-	208	29,79
17	Wonosari	18	-	149	31,14
18	Delanggu	16	-	37	18,78
19	Polanharjo	18	-	44	23,84
20	Karanganom	19	-	48	24,06
21	Tulung	18	-	185	32,00
22	Jatinom	17	1	207	35,53
23	Kemalang	13	-	214	51,66
24	Klaten Selatan	11	1	112	14,43
25	Klaten Tengah	3	6	97	8,92
26	Klaten Utara	6	2	124	10,38
	<b>Jumlah</b>	<b>391</b>	<b>10</b>	<b>3.703</b>	<b>655,56</b>

*Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bagian Pemerintahan, Setda Kabupaen Klaten Tahun 2018*

Dari tabel diatas Kecamatan Kemalang merupakan kecamatan yang terluas mencapai 7,88% dari luas wilayah Kabupaten Klaten, sedangkan Kecamatan Klaten Tengah merupakan kecamatan yang paling sempit yaitu hanya 1,36% dari luas wilayah Kabupaten Klaten.

### **c. Topografi Kabupaten Klaten**

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Klaten diapit oleh Gunung Merapi dan Pegunungan Seribu, dengan ketinggian antara 76 – 1.60 m dpl (di atas permukaan laut). Secara geografis terbagi ke dalam 3 (tiga) wilayah, yaitu:

1. Wilayah lereng Gunung Merapi (wilayah bagian utara) yang meliputi Kecamatan Karangnongko, Kemalang, Jatinom dan Tulung.
2. Wilayah datar (wilayah bagian tengah) yang meliputi wilayah kecamatan-kecamatan Manisrenggo, Klaten Tengah, Kalikotes, Klaten Utara, Klaten Selatan, Ngawen, Kebonarum, Wedi, Jogonalan, Prambanan, Gantiwarno, Delanggu, Wonosari,

Juwiring, Ceper, Pedan, Karangdowo, Trucuk, Cawas, Karanganom, Polanharjo.

3. Wilayah berbukit / gunung kapur (wilayah bagian selatan) yang hanya meliputi sebagian Kecamatan Bayat, Cawas dan Gantiwarno.

Dari sisi topografi wilayah Kabupaten Klaten, dirinci sebagai berikut:

1. Wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 m di atas permukaan laut (dpl) meliputi sebagian dari kecamatan : Juwiring, Karangdowo dan Cawas
2. Wilayah dengan ketinggian antara 100 – 200 m dpl meliputi Kecamatan: Prambanan, Jogonalan, Gantiwarno, Wedi, Bayat, Cawas (di bagian barat), Trucuk, Kalikotes, Klaten Selatan, Klaten Tengah, Klaten Utara, Kebonarum (di bagian selatan), Ngawen (di bagian selatan dan timur), Ceper, Pedan, Karanganom (di bagian timur), Polanharjo (di bagian timur), Delanggu, Juwiring (di bagian barat) dan Wonosari (di bagian barat).
3. Wilayah dengan ketinggian antara 200 – 400 m dpl meliputi Kecamatan: Manisrenggo, Jogonalan (di bagian utara), Karangnongko, Kebonarum (di bagian utara), Ngawen (di bagian utara), Jatinom, Karanganom (di bagian barat), Tulung (sebagian besar) dan Polanharjo (bagian barat).
4. Wilayah dengan ketinggian antara 400 – 1000 m dpl meliputi Kecamatan: Kemalang (sebagian besar), Manisrenggo (sebagian besar), Jatinom (sebagian kecil) dan Tulung (sebagian kecil).
5. Wilayah dengan ketinggian 1.000 – 2000 m dpl berada di Kecamatan Kemalang.

#### **d. Iklim di Kabupaten Klaten**

Kabupaten Klaten memiliki iklim tropis dengan musim hujan dan musim kemarau silih berganti sepanjang tahun, temperatur antara 28–30 derajat Celcius, dan kecepatan angin rata-rata berkisar 20–25 km/jam.

#### **e. Kondisi Hidrologi**

Kabupaten Klaten dilalui 80 sungai dengan berbagai klasifikasi (ordo), yaitu: (i) 1 sungai berklasifikasi induk yaitu Bengawan Solo, (ii) 1 sungai berklasifikasi Ordo I yaitu sungai Dengkeng, (iii) 24 sungai dengan klasifikasi ordo II, dan (iv) 54 sungai dengan Ordo III. Potensi air lainnya adalah sumber mata air. Terdapat 174 titik sumber mata air yang tersebar di 20 (dua

puluh) Kecamatan. Dimana sumber air terbanyak terdapat di Kecamatan Tulung (24 lokasi) dan Manisrenggo (24 lokasi).

#### f. Jenis Tanah di Kabupaten Klaten

Jenis tanah di Kabupaten Klaten terdiri dari 5 (lima) macam, yaitu:

##### 1. Litosol :

Bahan induk dari skis kristalin dan batu tulis terdapat di daerah Kecamatan Bayat.

##### 2. Regosol Kelabu:

Bahan induk abu dan pasir vulkanik termedier terdapat di Kecamatan Cawas, Trucuk, Klaten Tengah, Kalikotes, Kebonarum, Klaten Selatan, Karangnongko, Ngawen, Klaten Utara, Ceper, Pedan, Karangdowo, Juwiring, Wonosari, Delanggu, Polanharjo, Karanganom, TulungdanJatinom.

##### 3. Grumusol Kelabu Tua :

Bahan induk berupa abu dan pasir vulkan intermedier terdapat di daerah Kecamatan Bayat, Cawas sebelah selatan.

##### 4. Kompleks Regosol Kelabu dan Kelabu Tua :

Bahan induk berupa batu apurnapal terdapat di daerah Kecamatan Klaten Tengah dan Kalikotes sebelah selatan.

##### 5. Regosol Coklat Kekelabuan:

Bahan induk berupa abu dan pasir vulkan intermedier terdapat di daerah Kecamatan Kemalang, Manisrenggo, Prambanan, Jogonalan, Gantiwarno dan Wedi.

## 2. Gambaran Umum Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Klaten pada tahun 2017 berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten yang berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) sebanyak 1.304.519 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 650.928 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 653.591 jiwa. Uraian aspek kependudukan Kabupaten Klaten bisa dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel:1.2**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2015 - 2017**

URAIAN ASPEK KEPENDUDUKAN	2015	2016	2017
JUMLAH PENDUDUK			
a. Laki laki	642.738	649.239	650.928
b. Perempuan	649.275	651.467	653.591
<b>Jumlah</b>	<b>1.292.013</b>	<b>1.300.706</b>	<b>1.304.519</b>

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Klaten Tahun 2018 berdasarkan Administrasi database

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Klaten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, demikian pula dengan kepadatan penduduk di Kabupaten Klaten. Pertambahan penduduk pada tahun 2017 di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan sebesar 0,29% jika dibandingkan tahun 2016. Jumlah penduduk dimasing-masing kecamatan di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel:1.3**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten Per-Kecamatan**  
**Tahun 2017**

NO	KECAMATAN	TAHUN		
		2015	2016	2017
1	PRAMBANAN	54.588	51.861	51.292
2	GANTIWARNO	45.226	40.618	40.042
3	WEDI	58.714	53.673	52.843
4	BAYAT	68.951	64.399	63.757
5	CAWAS	63.657	60.509	59.689
6	TRUCUK	82.369	79.930	78.740
7	KEBONARUM	22.123	20.833	20.404
8	JOGONALAN	63.634	59.725	58.878
9	MANISRENGGO	45.189	43.521	42.866
10	KARANGNONGKO	39.258	37.613	37.050
11	CEPER	70.003	65.587	66.055
12	PEDAN	51.162	48.235	49.011
13	KARANGDOWO	48.770	45.617	46.541
14	JUWIRING	57.140	60.211	61.327
15	WONOSARI	58.374	64.846	64.945
16	DELANGGU	41.012	43.354	43.975
17	POLANHARJO	40.386	42.551	43.278
18	KARANGANOM	43.134	47.111	47.306
19	TULUNG	49.655	54.401	55.820
20	JATINOM	53.566	60.262	61.477
21	KEMALANG	34.871	38.502	39.321
22	NGAWEN	42.491	46.039	46.696
23	KALIKOTES	33.938	37.465	38.009
24	KLATEN UTARA	44.197	47.462	48.098
25	KLATEN TENGAH	39.158	41.907	42.355
26	KLATEN SELATAN	40.447	44.474	44.744
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.292.013</b>	<b>1.300.706</b>	<b>1.304.519</b>

*Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Klaten Tahun 2018 berdasarkan Administrasi database*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Trucuk adalah yang paling banyak dengan jumlah penduduk 78.740 jiwa, diikuti oleh Kecamatan Cepher (66.055 jiwa)



dan Kecamatan Wonosari (64.945 jiwa). Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Kebonarum dengan jumlah penduduk 20.404 jiwa.

**a. Komposisi Penduduk Berdasarkan Usia**

Komposisi Penduduk Kabupaten Klaten pada tahun 2017 berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.4**  
**Komposisi Penduduk Kabupaten Klaten**  
**Berdasarkan Usia Tahun 2017**

No.	USIA	JUMLAH (Jiwa)
	0 – 4 tahun	83.044
1)	5 - 9 tahun	94.585
2)	10 - 14 tahun	97.117
3)	15 - 19 tahun	95.917
4)	20 - 24 tahun	95.014
5)	25 – 29 tahun	91.469
6)	30 – 34 tahun	104.620
7)	35 – 39 tahun	109.265
8)	40 – 44 tahun	100.714
9)	45 – 49 tahun	96.633
10)	50 – 54 tahun	89.028
11)	55 – 59 tahun	74.548
12)	60 – 64 tahun	57.323
13)	65 – 69 tahun	41.054
14)	70 - 74 tahun	29.903
15)	75 tahun ke atas	44.285
	<b>Jumlah</b>	<b>1.304.519</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten Tahun 2018

**b. Komposisi Penduduk berdasarkan Jenis Pekerjaan**

Komposisi penduduk Kabupaten Klaten dilihat dari jenis pekerjaannya sangat beragam, tabel berikut menunjukkan komposisi penduduk Kabupaten Klaten pada tahun 2017 berdasarkan jenis pekerjaan.

**Tabel : 1.5**  
**Komposisi Penduduk Kabupaten Klaten**  
**berdasarkan Jenis Pekerjaan**

NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1)	BELUM/TIDAK BEKERJA	242.818
2)	MENGURUS RUMAH TANGGA	125.922
3)	PELAJAR/MAHASISWA	232.328
4)	PENSIUNAN	14.036
5)	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	19.020
6)	TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)	1.822
7)	KEPOLISIAN RI (POLRI)	1.795

<b>NO.</b>	<b>JENIS PEKERJAAN</b>	<b>JUMLAH</b>
8)	PERDAGANGAN	13.766
9)	PETANI/PEKEBUN	25.630
10)	PETERNAK	879
11)	NELAYAN/PERIKANAN	42
12)	INDUSTRI	758
13)	KONSTRUKSI	354
14)	TRANSPORTASI	593
15)	KARYAWAN SWASTA	113.803
16)	KARYAWAN BUMN	6.953
17)	KARYAWAN BUMD	520
18)	KARYAWAN HONORER	3.830
19)	BURUH HARIAN LEPAS	334.823
20)	BURUH TANI/PERKEBUNAN	35.648
21)	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	124
22)	BURUH PETERNAKAN	227
23)	PEMBANTU RUMAH TANGGA	555
24)	TUKANG CUKUR	91
25)	TUKANG LISTRIK	117
26)	TUKANG BATU	2.398
27)	TUKANG KAYU	4.258
28)	TUKANG SOL SEPATU	51
29)	TUKANG LAS/PANDAI BESI	396
30)	TUKANG JAHIT	2.718
31)	TUKANG GIGI	27
32)	PENATA RIAS	174
33)	PENATA BUSANA	26
34)	PENATA RAMBUT	70
35)	MEKANIK	801
36)	SENIMAN	287
37)	TABIB	22
38)	PARAJI	25
39)	PERANCANG BUSANA	21
40)	PENTERJEMAH	11
41)	IMAM MASJID	17
42)	PENDETA	153
43)	PASTOR	37
44)	WARTAWAN	85
45)	USTADZ/MUBALIGH	66
46)	JURU MASAK	63
47)	PROMOTOR ACARA	3
48)	ANGGOTA DPR RI	1
49)	ANGGOTA DPD RI	1
50)	ANGGOTA BPK	1
51)	BUPATI	1
52)	ANGGOTA DPRD PROP	3
53)	ANGGOTA DPRD KAB/KOTA	55
54)	DOSEN	638
55)	GURU	10.221
56)	PILOT	1
57)	PENGACARA	54
58)	NOTARIS	53
59)	ARSITEK	33

<b>NO.</b>	<b>JENIS PEKERJAAN</b>	<b>JUMLAH</b>
60)	AKUNTAN	14
61)	KONSULTAN	74
62)	DOKTER	488
63)	BIDAN	634
64)	PERAWAT	1.291
65)	APOTEKER	141
66)	PSIKIATER/PSIKOLOG	7
67)	PENYIAR RADIO	7
68)	PELAUT 1	398
69)	PENELITI	19
70)	SOPIR	2.877
71)	PIALANG	9
72)	PARANORMAL	11
73)	PEDAGANG	21.952
74)	PERANGKAT DESA	2.081
75)	KEPALA DESA	363
76)	BIARAWAN/BIARAWATI	37
77)	WIRASWASTA	53.948
78)	PEKERJAAN LAINNYA	20.932
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.304.519</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten Tahun 2018

### c. Komposisi Penduduk berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan pendidikan, penduduk Kabupaten Klaten secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel : 1.6**

### **Komposisi Penduduk Kabupaten Klaten Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

<b>NO</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>TAHUN 2017</b>
1)	Tidak/Belum Sekolah	237.466
2)	Belum Tamat SD/Sederajat	139.878
3)	Tamat SD/Sederajat	289.664
4)	SLTP/Sederajat	203.602
5)	SLTA//Sederajat	347.098
6)	Diploma I/II	8.740
7)	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	23.714
8)	Diploma IV/Strata I	51.619
9)	Strata II	2.578
10)	Strata III	160
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.304.519</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten Tahun 2018

Jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Klaten tahun 2015 - 2017 per Kecamatan dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 1.7**  
**Jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Klaten**  
**Per Kecamatan Tahun 2015 - 2017**

NO	KECAMATAN	2015	2016	2017
1	PRAMBANAN	18.458	17.572	18.036
2	GANTIWARNO	16.297	14.356	14.664
3	WEDI	20.406	18.353	18.798
4	BAYAT	22.496	20.829	21.374
5	CAWAS	21.415	21.212	21.703
6	TRUCUK	26.841	26.409	26.526
7	KEBONARUM	7.721	7.227	7.312
8	JOGONALAN	22.273	20.249	20.591
9	MANISRENGGO	14.994	14.746	14.991
10	KARANGNONGKO	13.247	12.741	13.012
11	CEPER	24.471	21.815	22.417
12	PEDAN	17.295	16.354	17.091
13	KARANGDOWO	17.051	16.058	16.769
14	JUWIRING	19.830	19.929	20.893
15	WONOSARI	19.996	21.761	22.313
16	DELANGGU	14.557	14.674	15.300
17	POLANHARJO	14.359	14.517	15.130
18	KARANGANOM	15.106	15.948	16.432
19	TULUNG	17.239	18.068	19.043
20	JATINOM	18.808	20.035	20.978
21	KEMALANG	12.264	12.725	13.240
22	NGAWEN	14.474	14.909	15.599
23	KALIKOTES	11.433	12.350	12.904
24	KLATEN UTARA	14.670	15.226	15.850
25	KLATEN TENGAH	13.733	14.021	14.626
26	KLATEN SELATAN	14.107	14.861	15.350
	<b>JUMLAH</b>	<b>443.541</b>	<b>436.945</b>	<b>450.942</b>

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Klaten Tahun 2018 berdasarkan Administrasi database

### 3. Potensi Daerah

#### 1) Potensi Pertanian

Potensi kawasan pertanian tanaman pangan mencakup luasan kurang lebih 28.949 (dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) hektar berada di seluruh Kecamatan, dengan perincian sebagai berikut:

- A. Potensi Kawasan peruntukan hortikultura mencakup luasan kurang lebih 2.422 (dua ribu empat ratus dua puluh dua) hektar meliputi kecamatan: Bayat, Cawas, Ceper, Delanggu, Gantiwarno, Jatinom, Jogonalan, Juwiring, Kalikotes, Karanganom, Karangdowo, Karangnongko, Kemalang, Manisrenggo, Ngawen, Pedan, Prambanan, Trucuk, Tulung, Wedi, dan Wonosari.
- B. Potensi Kawasan peruntukan perkebunan mencakup luasan kurang lebih 1.080 (seribu delapan puluh) hektar terdiri atas komoditas:
  - Kelapa deres meliputi Kecamatan Bayat, Gantiwarno, Jogonalan, Kalikotes, Kemalang, Manisrenggo dan Wedi.
  - Kapuk meliputi Kecamatan Gantiwarno, Jatinom, Jogonalan, Kalikotes, Ngawen, Prambanan, dan Tulung.
  - Kopi meliputi Kecamatan Jatinom, Karangnongko, Kemalang, Tulung dan Manisrenggo.
  - Tembakau rajangan dan asepan meliputi Kecamatan Bayat, Ceper, Gantiwarno, Jatinom, Jogonalan, dan Kemalang.
  - Tembakau Virginia meliputi Kecamatan Pedan dan Trucuk.
  - Tembakau Vorsternland meliputi Kecamatan Gantiwarno, Jogonalan, Kebonarum, Klaten Selatan, Klaten Utara, dan Wedi.
  - Cengkeh meliputi Kecamatan Jatinom, Karangnongko, Kemalang, Manisrenggo dan Tulung.
  - Tebu meliputi Kecamatan Bayat, Ceper, Pedan, Jatinom, Gantiwarno, Jogonalan dan Prambanan.
- C. Potensi Pengembangan kawasan luasan kurang lebih 434 (empat ratus tiga puluh empat) hektar meliputi Kecamatan Bayat, Cawas, Gantiwarno, Jatinom, Jogonalan, Wedi, Karangdowo, Karangnongko, Kebonarum, Kemalang, Manisrenggo, Ngawen, Prambanan dan Tulung.
- D. Potensi Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan mencakup luasan kurang lebih 32.451 (tiga puluh dua ribu

empat ratus lima puluh satu) hektar ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB).

## 2) **Potensi Perikanan**

Potensi Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas:

### A. Potensi Kawasan Peruntukan Perikanan Tangkap.

Kawasan peruntukan perikanan tangkap mencakup seluruh perairan badan sungai di wilayah Kabupaten.

### B. Potensi Kawasan Peruntukan Perikanan Budidaya.

Kawasan peruntukan perikanan budidaya meliputi:

- Waduk atau rawa dengan luas kurang lebih 170 (seratus tujuh puluh) hektar berada di Kecamatan Bayat.
- Budidaya pembibitan dan budidaya pembesaran dengan luas kurang lebih 113 (seratus tiga belas) hektar meliputi Kecamatan Bayat, Cawas, Jogonalan, Juwiring, Kalikotes, Karanganom, Karangdowo, Karangnongko, Kebonarum, Manisrenggo, Ngawen, Polanharjo, Prambanan dan Tulung.
- Pengembangan budidaya perikanan berbasis sistem kewilayahan dilaksanakan melalui pengembangan kawasan minapolitan dengan komoditasi ikan nila meliputi Kecamatan Karanganom, Polanharjo dan Tulung.

## 3) **Potensi Wisata**

Potensi wisata yang ada di Kabupaten Klaten sebenarnya sangat beragam. yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi obyek wisata yang bisa menarik para wisatawan, lokal, regional maupun manca negara. Adapun potensi wisata yang ada di Kabupaten Klaten yang sangat beragam dan memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan antara lain :

### A. Potensi pariwisata budaya meliputi;

- a) Candi Prambanan, Candi Sojiwan, Candi Buhrah, Candi Lumbung, Candi Sewu, Candi Asu/Gana, Candi Lor/Candirejo, Candi Plaosan Lor, dan Candi Plaosan Kidul berada di Kecamatan Prambanan.
- b) Candi Merak berada di Kecamatan Karangnongko;
- c) Museum Gula Jawa Tengah berada di Kecamatan Jogonalan.
- d) Makam Ki Ageng Gribig dan Tradisi Yaqowiyu berada di Kecamatan Jatinom;
- e) Makam Ki Ageng Pandanaran berada di Kecamatan Bayat.
- f) Makam Ki Ageng Ronggowarsito berada di Kecamatan Trucuk.

- g) Makam Ki Ageng Perwito berada di Kecamatan Wonosari.
- h) Keunikan lokal desa wisata meliputi desa :
  1. Desa Wisata Kebondalem Kidul Kecamatan Prambanan;
  2. Desa Wisata Melikan Kecamatan Wedi;
  3. Desa Wisata Duwet Kecamatan Ngawen;
  4. Desa Wisata Soran Kecamatan Ngawen;
  5. Desa Wisata Ponggok Kecamatan Polanharjo;
  6. Desa Wisata Plawikan Kecamatan Jogonalan;
  7. Desa Wisata Jimbung Kecamatan Kalikotes;
  8. Desa Wisata Krakitan Kecamatan Bayat;
  9. Desa Wisata Pokak Kecamatan Ceper; dan
  10. Desa Wisata lainnya sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah.

B. Potensi pariwisata alam meliputi:

1. Deles Indah berada di Kecamatan Kemalang;
2. Gunung Watu Prau dan Pegunungan Kidul berada di Kecamatan Bayat; dan
3. Kawasan keunikan batuan dan fosil berada di Kecamatan Bayat.

C. Potensi pariwisata buatan.

1. Rawa Jombor Permai berada di Kecamatan Bayat;
2. Obyek Wisata Mata Air Cokro (OMAC), Pemandian Lumban Tirto, Umbul Pelem dan Pemancingan Janti berada di Kecamatan Tulung;
3. Pemandian Umbul Ponggok dan Umbul Manten berada di Kecamatan Polanharjo;
4. Pemandian Jolotundo berada di Kecamatan Karanganom; dan
5. Pemandian Tirtomulyono dan Pemandian Tirtomulyani berada di Kecamatan Kebonarum.

4) **Potensi Industri**

Industri merupakan salah satu pendukung perekonomian di suatu daerah, dengan banyaknya industri maka perekonomian di suatu daerah akan semakin meningkat. Sehingga sektor industri ini perlu didorong agar berkembang yang mampu meningkatkan perekonomian suatu daerah.

Di Kabupaten sektor industri sebagai basis ekonomi untuk sektor industri manufaktur berdasarkan sebaran di tingkat kecamatan yang terbesar berada di Kecamatan Ceper,

Kecamatan Trucuk, Kecamatan Wedi, Kecamatan Prambanan dan Kecamatan Jogonalan.

Untuk industri logam dan besi banyak terdapat di Kecamatan Ceper, Kecamatan Polanharjo dan Kecamatan Karangnom. Industri kertas dan percetakan terdapat di Kecamatan Klaten Utara dan Klaten Tengah. Industri kayu dan *furniture* terdapat di Kecamatan Ceper, Trucuk, Cawas, Juwiring dan Klaten Utara.

Kawasan potensial sentra industri logam terdapat di Kecamatan Ceper, Polanharjo, Karangnom, Delanggu, Wonosari dan Jatinom.

Sentra industri tembakau terdapat di Kecamatan: Prambanan, Manisrenggo, Kebonarum, Wedi, Klaten Selatan, Ngawen, Gantiwarno, Trucuk, Jogonalan, Karangnongko, Kemalang, Tulung, Bayat, Pedan, Karangdowo, Wonosari, Jatinom Klaten Utara dan Ceper. Sentra industri gerabah terdapat di Kecamatan : Wedi, Bayat, Wonosari, Klaten Tengah, Pedan, dan Kalikotes.

Industri Lurik, merupakan salah satu industri yang beberapa tahun ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Produk lurik ternyata untuk trend mode saat ini sudah mulai digemari tidak hanya oleh warga Klaten saja, namun lurik juga sudah mulai digemari oleh masyarakat di luar Kabupaten Klaten. Kecamatan Pedan, Bayat, Trucuk, Juwiring, Karangdowo dan Cawas merupakan salah satu sentra industri lurik ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin) ini, sehingga sering terkenal dengan sebutan lurik Pedan, dan diharapkan di tahun-tahun mendatang lurik bisa menjadi salah satu icon dari Kabupaten Klaten sebagai salah satu ciri khasnya.

Sentra industri mebel terdapat di Kecamatan: Klaten Utara, Trucuk, Cawas, Juwiring, Ngawen, Ceper dan Kalikotes. Adapun sentra industri konveksi terdapat di Kecamatan Jogonalan, Wedi, Klaten Selatan, Pedan, Ngawen, Ceper, Karangdowo, dan Delanggu.

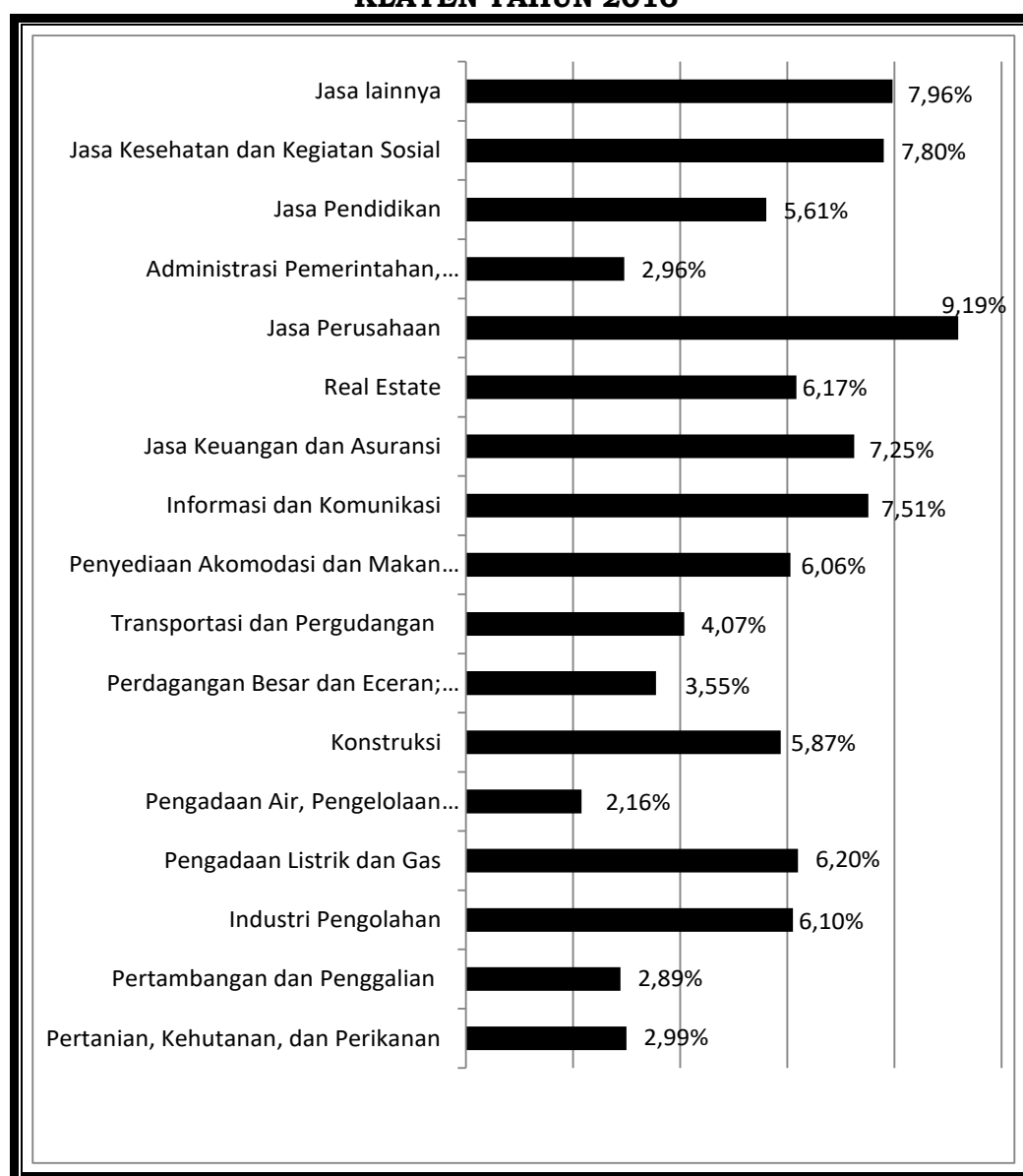


#### 4. Kondisi Ekonomi

##### a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Pertumbuhan tersebut merupakan agregat dari pertumbuhan setiap sektornya. Untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2016 digunakan PDRB atas dasar harga konstan 2010. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten tahun 2016 sebesar 5,14 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2015 dengan pertumbuhan 5,3 persen.

**GAMBAR 1.1**  
**PERTUMBUHAN MENURUT LAPANGAN USAHA DI KABUPATEN**  
**KLATEN TAHUN 2016**



Sumber : BPS Kab. Klaten Tahun 2017

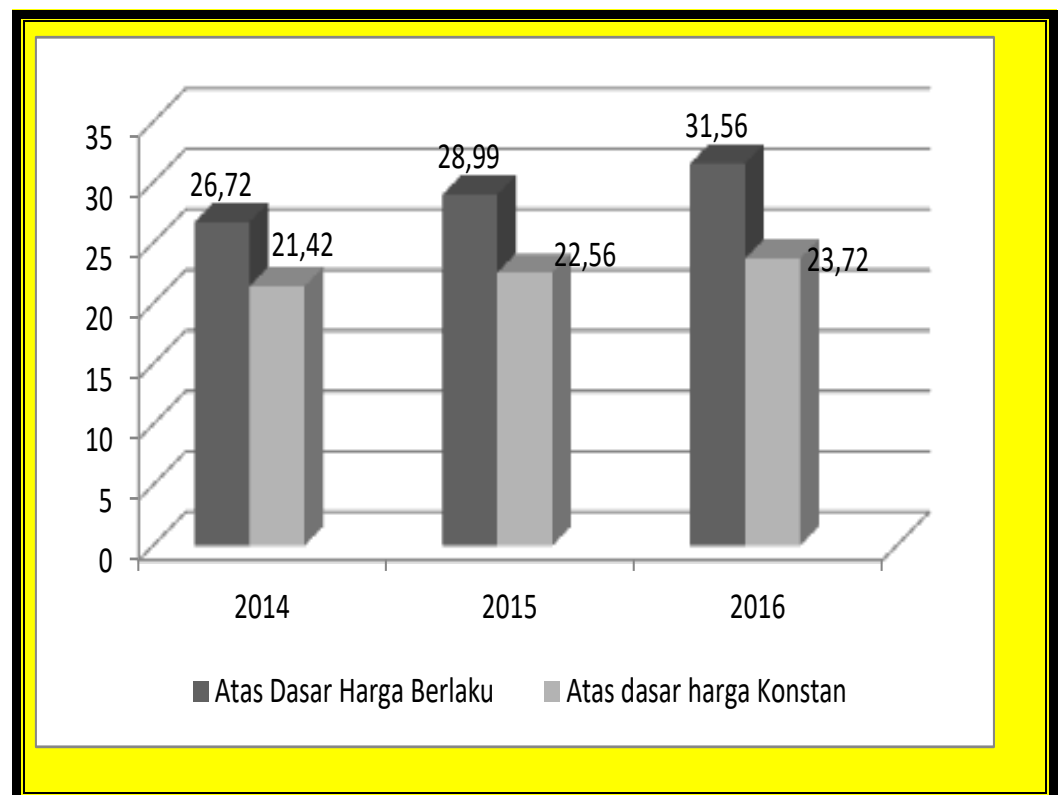
Seperti halnya pertumbuhan ekonomi secara agregat, pertumbuhan setiap lapangan usaha di Kabupaten Klaten mayoritas menunjukkan angka yang positif. Pertumbuhan ekonomi tertinggi di

tahun 2016 dicapai oleh lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar 9,19 persen. Laju pertumbuhan tertinggi berikutnya yaitu lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 7,96 persen, diikuti Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,8 persen, Informasi dan Komunikasi sebesar 7,51 persen dan Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 7,25 persen. Lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan di bawah 7 persen. Sedangkan lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang memiliki pertumbuhan ekonomi terendah yaitu 2,16 persen.

#### **b. PDRB**

PDRB Kabupaten Klaten terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar 31,56 triliun rupiah, naik sekitar 8,87 persen dari tahun 2015 yang sebesar 28,99 triliun rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 tahun 2016 sebesar 23,72 triliun rupiah, naik sekitar 5,14 persen dari tahun 2015 yang sebesar 22,56 triliun rupiah.

**Gambar 1.2**  
**PDRB Kabupaten Klaten Tahun 2014-2016 (Triliun Rupiah)**



Sumber: BPS Kabupaten Klaten 2017

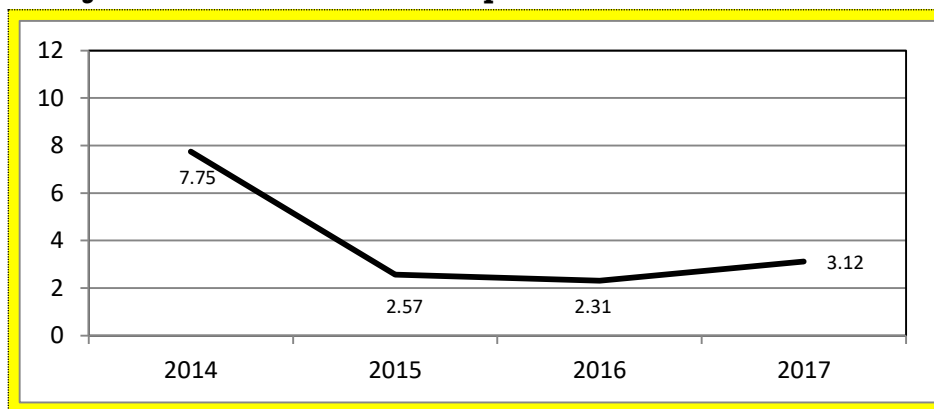
### c. PDRB Per Kapita

PDRB perkapita dapat dijadikan salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Klaten rata-rata mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar nilai per-kapita di masing-masing tahun tersebut. Perkembangan PDRB perkapita di Kabupaten Klaten atas dasar harga berlaku menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 PDRB perkapita di Kabupaten Klaten sebesar 27,13 juta rupiah naik sekitar 8,45 persen dari tahun 2015 yang sebesar 25,02 juta rupiah. PDRB perkapita atas dasar harga konstan 2010 juga mengalami peningkatan tiap tahun, dari 19,47 juta rupiah di tahun 2015 menjadi 20,39 juta rupiah di tahun 2016 atau meningkat sebesar 4,74 persen.

### d. Inflasi

Perkembangan inflasi tahunan di Kabupaten Klaten selama 4 (empat) tahun dari tahun 2014 sampai 2017 menunjukkan fluktuasi. Adapun laju inflasi di Kabupaten Klaten pada tahun 2014-2017 dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:

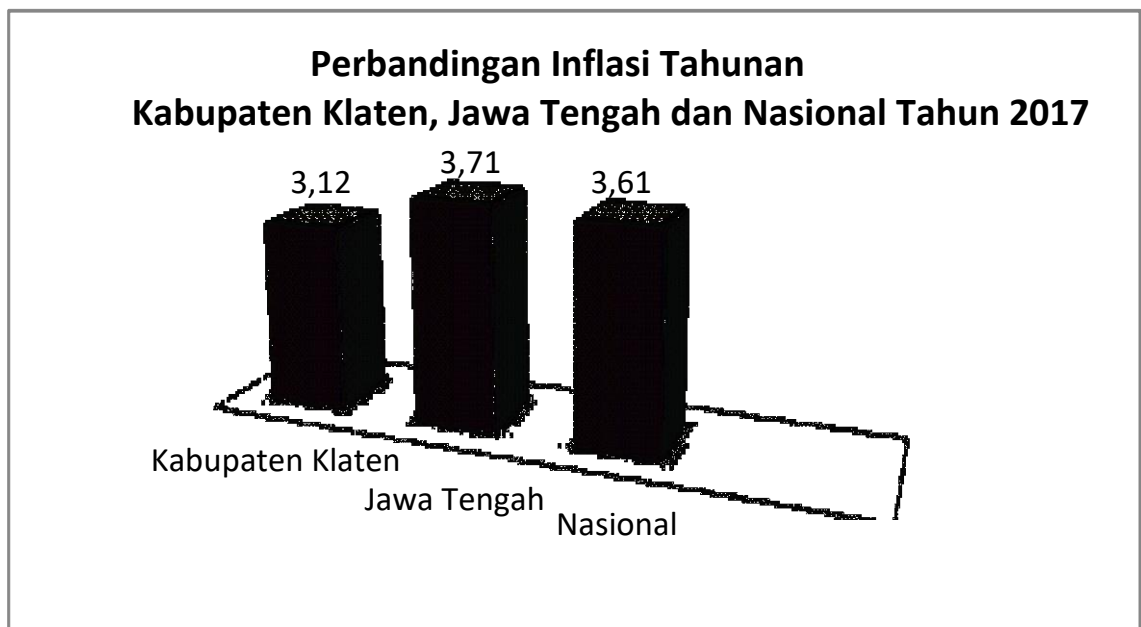
**Gambar 1.3**  
**Laju inflasi tahunan di Kabupaten Klaten tahun 2014-2017**



Sumber : BPS Kabupaten Klaten tahun 2018

Berdasarkan gambar di atas, inflasi tahunan di Kabupaten Klaten mengalami fluktuasi dari tahun 2014 sebesar 7,75% kemudian turun menjadi 2,57% pada tahun 2015, kemudian turun lagi menjadi 2,31% di tahun 2016, dan naik menjadi 3,12% di tahun 2017. Inflasi tahunan di Kabupaten Klaten pada tahun 2017 sebesar 3,12%, atau lebih tinggi dibanding tahun 2016 yang sebesar 2,31%. Perbandingan inflasi tahunan di Kabupaten Klaten pada Tahun 2017 jika dibandingkan inflasi tahunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tersaji pada gambar di bawah ini :

**Gambar 1.4**  
**Perbandingan Inflasi tahunan**  
**di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017**



*Sumber: BPS Kabupaten Klaten tahun 2018*

Berdasarkan gambar diatas, inflasi tahunan di Kabupaten Klaten yang sebesar 3,12% masih tergolong ringan dan dibawah inflasi tahunan Provinsi Jawa Tengah (3,71%) dan inflasi tahunan Nasional (3,61%).

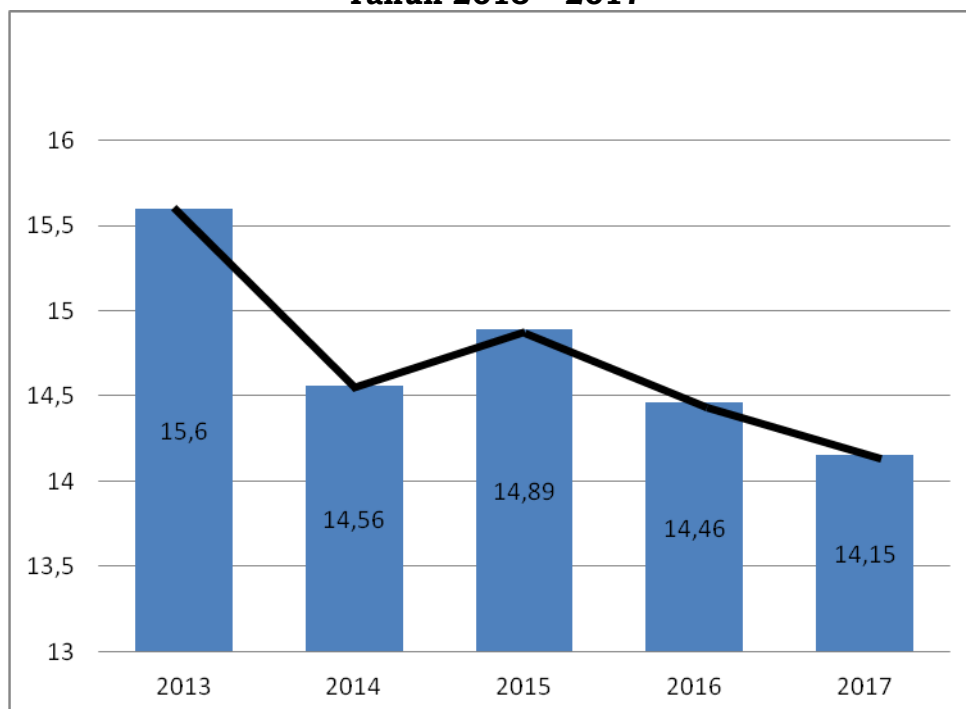
**e. Kemiskinan**

Kondisi umum kemiskinan Kabupaten Klaten merupakan gambaran mengenai fakta dan permasalahan yang ada pada kondisi capaian dan perkembangan kemiskinan di Indonesia. Kondisi tersebut dapat dilihat dari capaian beberapa indikator, yaitu persentase penduduk miskin (Po) dan jumlah penduduk miskin.

**1. Persentase Penduduk Miskin**

Posisi relatif persentase penduduk miskin Kabupaten Klaten Klaten Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Gambar di bawah ini :

**Gambar 1.5**  
**Grafik Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Klaten**  
**Tahun 2013 – 2017**



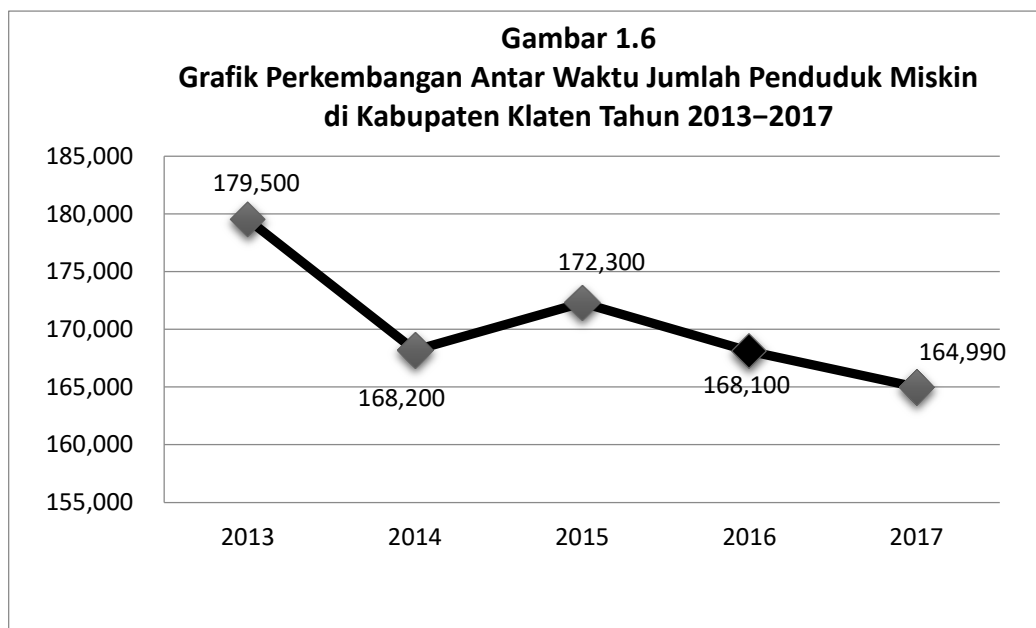
Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2018

Pada Gambar diatas ditunjukkan posisi relatif Persentase penduduk miskin Kabupaten Klaten pada tahun 2017 sebesar 14,15%. Dilihat dari perkembangannya, persentase penduduk miskin Kabupaten Klaten terus mengalami penurunan (kinerja positif), dari sebesar 15,6% pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi sebesar 14,15% pada tahun 2017 atau turun sebesar 1,45% selama 5 (lima) tahun terakhir. Sementara untuk 1 (satu) tahun terakhir persentase kemiskinan Kabupaten Klaten juga mengalami penurunan dari 14,46% pada tahun 2016 menjadi 14,15% pada tahun 2017 atau turun sebesar 0,31%.

## **2. Jumlah Penduduk Miskin**

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Klaten terus mengalami penurunan (kinerja positif). Dalam rentang waktu 2013-2017, dari sebanyak 179.500 jiwa pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi sebanyak 164.990 jiwa pada tahun 2017 atau turun sebanyak 14.510 jiwa. Sementara untuk 1 (satu) tahun terakhir jumlah penduduk miskin Kabupaten Klaten juga mengalami penurunan dari 168.100 jiwa pada tahun 2016 menjadi 164.990 jiwa pada tahun 2017 atau turun sebesar 3.110 jiwa. Untuk melihat

perkembangan antar waktu jumlah penduduk Miskin pada tahun 2013 – 2017 dapat dilihat dalam Gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Kab. Klaten 2018

**f. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Klaten, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Klaten pada tahun 2017 sebesar 66,93% dan tingkat Pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,35%. Adapun untuk Penduduk usia kerja sebanyak 916.377 jiwa, dengan angkatan kerja sebanyak 613.345 jiwa dan Jumlah yang menganggur sebanyak 26.661 jiwa.